

ANALISIS PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DALAM PENYEDIAAN AKSES INFORMASI DI PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

¹ Muhammad Alif, Hardi Warsono ²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Globalisasi merupakan fenomena dimana masyarakat mengharapkan terjadinya sebuah interaksi yang jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan kemajuan teknologi di era globalisasi saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dibawah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah berinovasi dengan menjalankan konsep e-government, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi di era globalisasi saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berorientasi kepada pelayanan publik, dimana mereka menyediakan sebuah kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan perpustakaan melalui e-government. Program e-government yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah antara lain website, iJateng, RFID, InlisLite, RBM, dan fasilitas elektronik lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat pemerintah yang berwenang dan terlibat langsung dalam kegiatan e-government serta observasi lapangan. Sedangkan, data sekunder dikumpulkan melalui informasi yang tersedia pada website Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan data-data yang diperoleh dari tempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government sudah baik, namun pada pengembangan e-government masih terdapat beberapa permasalahan dalam SDM dan fasilitas yang ada. Direkomendasikan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi dorongan dalam pengembangan e-government di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik lagi, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada para pemustaka.

Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan Publik, Pengembangan *e-government*

ANALYSIS DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT ON PROVISION OF INFORMATION ACCESS IN CENTRAL JAVA'S PROVINCE LIBRARY

¹ Muhammad Alif, Hardi Warsono ²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Globalization is a phenomenon where people expect a much more effective and efficient interaction than before, both directly and indirectly. The Provincial Government of Central Java utilizes technological advances in the current era of globalization to fulfill the needs of citizens. Central Java Province Library under the Departemen of Archives and Central Java Library innovates by implementing the concept of e-government. Central Java Provincial Library oriented to public services. Where they provide an easy access for people who want to do library activities through e-government. The e-government programs owned by the Central Java Provincial Library include websites, iJateng, RFID, InlisLite, RBM, and other electronic facilities. The research method used is descriptive qualitative. Primary data is collected through interviews with government officials who are authorized and directly involved in e-government activities and field observations. Meanwhile, secondary data is collected through information available on the Central Java Province Library website and data obtained from the site. The results showed that the implementation of e-government was good, but in the development of e-government there were still some problems in Human Resources and existing facilities. It is recommended that the results of this study can be a boost in the development of e-government in the Central Java Provincial Library which is better than before, so that it can provide more optimal public services to the visitors.

Keywords : *Innovation, Public Services, E-government Development*

A. PENDAHULUAN

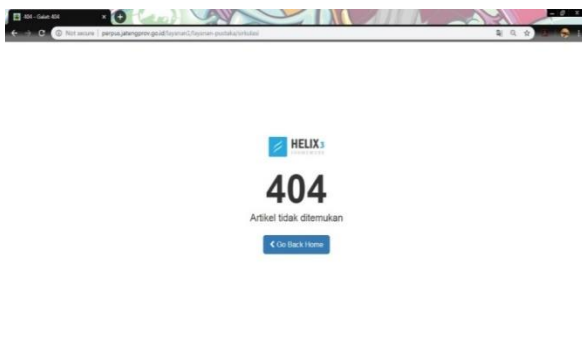
Pengembangan *e-government* diseluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dengan dîterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Menurut Buwono (2016), *E-government* adalah penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. *E-government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi di lembaga pemerintah atau lembaga publik. Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* & Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *e-government* sendiri bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai bentuk pelayanan publik yang transparan terhadap masyarakat. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yakni

pengolahan data dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi bagi layanan public.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri memandang perlu untuk segera memiliki rencana induk pengembangan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Landasan dari penyelenggaraan *e-government* pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu pada PERGUB No.15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini tujuan diselenggarakannya konsep *e-governrment* yaitu agar tercipta dan terlaksananya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Sejauh ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa tengah melalui Bidang pengelolaan perpustakaan telah menerapkan *e-government* tersebut pada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, namun dalam mewujudkan tujuan dari pada PERGUB No.15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah tersebut, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah masih memiliki kendala dalam penerapan *e-government*. Adapun permasalahan tersebut diantaranya, penyediaan akses yang masih bermasalah. Contohnya pada sarana penyediaan informasi yang tersedia pada *website* menu sirkulasi layanan pustaka tidak dapat di akses. Fungsi dari menu sirkulasi ini adalah untuk mencari dan memastikan koleksi buku yang ada di dalam perpustakaan.

Gambar 1
Tampilan menu sirkulasi pada
***website* Perpustakaan Provinsi Jawa**
Tengah



Sumber: <http://perpus.jatengprov.go.id/>

Selain itu terdapat informasi yang disajikan oleh *website* Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang masih belum terbaharui atau *up to date* seperti survey indek kepuasan masyarakat yang masih tahun 2016.

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyediakan akses *gateway*

RFID (*Radio Frequency Identifiacion*) untuk meningkatkan keamanan perpustakaan. RFID yang disediakan oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah masih memiliki kendala seperti masih terdapat akses keluar perpustakaan yang belum dipasang alat RFID. Sehingga dapat mengurangi tingkat keamanan perpustakaan. Lalu *chip* yang ditanam pada buku-buku koleksi pada ruang layanan belum semuanya ditanam *chip* RFID.

Penyediaan akses selanjutnya yaitu melalui komputer dan *wifi* yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Akses ini juga masih terdapat beberapa kendala diantaranya komputer-komputer yang masih *jadul* dan jaringan *wifi* yang masih terkadang *lemot* atau lambat. Selanjutnya sistem komunikasi yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki sistem *InlisLite* yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Sistem *InlisLite* ini menyediakan berbagai bentuk aplikasi seperti *database* koleksi buku maupun sirkulasi perpustakaan. *InlisLite* ini dapat diakses oleh seluruh pegawai perpustakaan untuk memberikan informasi mengenai data yang di *input* oleh *user* dan dikomunikasikan dalam bentuk informasi.

Gambar 2
Tampilan database InlisLite



Sumber:

<https://inlislite.perpusnas.go.id/>

Pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yaitu berupa *iJateng* dan OPAC (*Online Public Access Catalog*). Berdasarkan kendala yang ada pada Peraturan Gubernur No.15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dijelaskan bahwa tujuan dari pengembangan *e-government* yaitu penyediaan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya dalam penyediaan akses informasi masih terdapat kendala seperti:

1. Tidak dapat diaksesnya konten *website* dan belum *up to date*
2. Jaringan *wifi* yang masih lambat dan sering *down* sehingga tidak dapat di akses
3. Kondisi komputer yang dapat terbilang masih *jadul* sehingga menghambat pengoperasiannya.

4. Alat RFID yang masih kurang dan *chip* yang ditanam di buku masih kurang.

Adapun tujuan dari penelitian ini nantinya adalah untuk menganalisis pengembangan *e-government* dalam penyediaan akses informasi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dan factor yang mempengaruhinya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1) Manajemen Publik

Overman (dalam Keban, 2004) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah "scientific management", meskipun sangat dipengaruhi "scientific management". Manajemen publik bukanlah "policy analysis" bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi "rational-instrumental" pada satu pihak dan orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan fisik, informasi dan politik disisi lain. Menurut Denhardt dan Denhardt (dalam Alamsyah, 2016:23), ada 3 (tiga) paradigm dalam manajemen public, salah satunya adalah paradigma

NPS (*New Public Service*). Dalam hal ini, *e-government* merupakan salah satu bentuk inovasi dari pelayanan publik. Dengan adanya perkembangan teknologi dan tingkat kolaborasi yang tinggi antar pihak, mendorong pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanannya melalui sebuah inovasi dalam yang dinamakan konsep *e-government*.

2) *E-Government*

Menurut Indrajit (dalam Widodo, 2016), mengatakan:

“*E-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan, dan dalam prakteknya *e-government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.”

Pada umumnya *e-government* digunakan untuk administrasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Terciptanya *e-government* diharapkan akan menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C), pemerintah dan bisnis (G2B) dan

hubungan antar pemerintah (G2G/ *inter agency relationship*).

3) Pengembangan *E-Government*

Pengembangan dalam *e-government* sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah. Adapun tahapan pengembangan *e-government* menurut Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* antara lain:

1. Tahap Persiapan, yang meliputi:
Pembuatan *web* sebagai media informasi disetiap lembaga;
Penyiapan Sumber daya Manusia; Penyiapan sarana akses yang mudah; dan Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
2. Tahap Pematangan, yang meliputi:
Pembuatan situs informasi publik interaktif; dan Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
3. Tahap Pemantapan yang meliputi:
Pembuatan situs transaksi pelayanan publik; dan Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

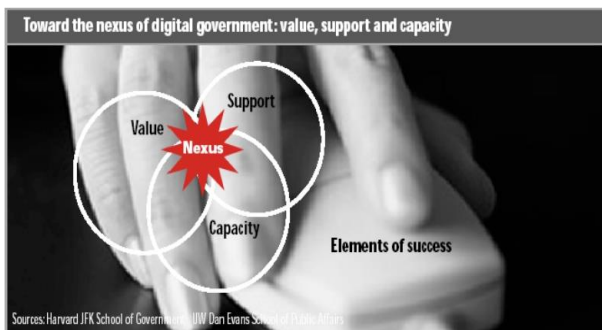
4. Tahap Pemanfaatan yang meliputi: Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *G2G*, *G2B* dan *G2C* yang terintegrasi

4) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan E-Government di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* (dalam Indrajit, 2006:13), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

1. *Support*,
2. *Capacity*,
3. *Value*.

Gambar 3
Elemen-elemen sukses pengembangan e-government



Sumber: Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government: Konsep Pelayanan*

Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Hal: 13.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan/metode kualitatif yang mana akan memberikan gambaran atau uraian berupa tulisan hasil pengamatan di lapangan, dan menjelaskan secara mendalam atas fenomena penelitian tersebut. Pada penelitian ini, penulis memilih lokus di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, membutuhkan informasi dari stakeholder yang terkait dengan pengelolaan e-government yang ada di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah: Kepala UPT Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Bagian Otomasi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dan Masyarakat/Pengunjung Perpustakaan. Jenis data yang digunakan merupakan data yang bukan bersifat numerik atau bukan angka-angka melainkan berupa uraian kata-kata atau kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah: Data Primer dan Data Sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan data, dilakukan melalui prosedur pengumpulan data dengan sejumlah metode, yaitu metode Interview/Wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Analisis Interpretasi Data yang digunakan dalam penelitian ini

melalui langkah – langkah: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan atau verifikasi. Peneliti dalam penelitian ini tidak akan menggunakan semuanya untuk menvalidasi data peneliti. Peneliti hanya akan menggunakan salah satu yaitu dengan strategi mentriangulasi (*triangulate*). Alasan menggunakan strategi triangulasi karena strategi ini mudah terjangkau untuk digunakan peneliti. Dan secara praktis, metode ini lebih mudah dipraktekkan untuk menvalidasi data ini.

D. PEMBAHASAN

Pengembangan *E-Government* Dalam Penyediaan Akses Informasi Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian menunjukkan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan konsep *e-government*. Adapun kondisi pengembangan *e-government* dalam penyediaan akses informasi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap yang pertama dari pengembangan *e-government* sekaligus tahap yang paling fundamental. Tahap persiapan ini memiliki 4 indikator yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pembuatan *website* sebagai Media Informasi: *Website* yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah masih terdapat kendala dimana masih terdapat beberapa konten yang tidak dapat diakses dan belum *up to date* yang disebabkan oleh kurangnya SDM untuk mengelola *website* Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Penyediaan Sumber Daya Manusia: Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan ahli di bidang IT di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah masih sangat kurang. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya permintaan pegawai *outsourcing* dan kecilnya minat para pegawai dalam mengikuti diklat.
3. Sarana dan Prasana: Sarana akses yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah antara lain RFID, *wifi*, dan sarana akses komputer. Masih terdapat kendala pada RFID yaitu *chip* dan alat yang masih kurang, *wifi* masih lambat dan komputer yang masih *jadul*. Sarana akses yang masih terbatas ini disebabkan oleh anggaran yang belum cukup dalam pengembangan *e-government*.

4. Sosialisasi: Yang terakhir yaitu sosialisasi yang masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh sistem sosialisasi yang dimiliki Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum dilaksanakan secara berkala. Sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat akan layanan-layanan RFID dan *iJateng*.

2) Tahap Pematangan

Tahap pematangan merupakan tahap pengembangan dari tahap persiapan. Tahap pematangan memiliki 2 indikator, namun terdapat 1 indikator yang masih bermasalah dan berdampak pada penyediaan akses informasi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Pembuatan Situs Informasi Publik Interaktif

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki situs informasi publik interaktif berupa media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *Instagram*. Media sosial yang dimiliki Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini menjadi situs informasi publik interaktif dimana masyarakat dapat berkomunikasi dengan pemerintah. Namun, pengetahuan masyarakat

akan media sosial ini masih minim. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi yang kurang. *Website* Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum memiliki sistem interaktif yang dapat menjadi sebuah situs informasi publik interaktif. Hal ini disebabkan oleh prioritas yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum mengarah untuk inovasi sistem interaktif pada *website* dan belum ada SDM yang dapat mengelola *website* 24 jam.

2. Pembuatan Antarmuka Keterhubungan dengan Lembaga Lain

Dalam *website* Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terdapat akses yang dapat menghubungkan secara antarmuka dengan lembaga lain. Hal ini meningkatkan pelayanan perpustakaan. Contohnya yaitu adalah *e-Resources* yang menghubungkan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan Perpustakaan Nasional dalam penyediaan akses jurnal *online*, *e-book*, artikel, dan karya referensi online lainnya. Untuk aplikasi antarmuka keterhubungan ini tidak terdapat kendala selama *website* Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhubung dengan *e-Resources* Perpustakaan Nasional.

3) Tahap Pematapan

Tahap pematapan merupakan memiliki 2 indikator yang berdampak pada penyediaan akses informasi Perpustakaan, yaitu:

1. Pembuatan Situs Transaksi Pelayanan Publik

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki situs transaksi pelayanan publik. Belum ada inovasi atau inisiatif dari Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pembaharuan situs *web* yang dapat menyediakan transaksi pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan biaya yang sangat besar sehingga tidak mencukupi untuk melakukan inovasi situs transaksi pelayanan publik. Jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia, masih belum mencukupi untuk mengoperasikan sistem transaksi pelayanan publik secara onlin dalam situs *web*.

2. Pembuatan Interoperabilitas Aplikasi Maupun Data dengan Lembaga Lain Aplikasi *InlisLite* yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah interoperabilitas antara Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan Perpustakaan Nasional. *InlisLite* menyediakan

aplikasi-aplikasi seperti OPAC, kartu anggota, sistem *database* yang menghubungkan antara Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan Perpustakaan Nasional.

4) Tahap Pemanfaatan

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki relasi yang cukup baik dengan sektor bisnis. Sehingga Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah membuat aplikasi layanan yang bersifat *Government to Business (iJateng dan website)*. Selain itu, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki inisiatif untuk meningkatkan relasi dengan masyarakat dengan membuat program layanan yang bersifat *Government to Citizens (Ruang Belajar Modern)*. Dan yang terakhir yaitu relasi hubungan antar pemerintah, yaitu *Government to Government (InlisLite)*.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pengembangan *E-Government* Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pengembangan *e-government* di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menggunakan teori faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan *e-government* menurut

Harvard JFK School of Government (dalam Indrajit, 2006:13) dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan *e-government* menurut *University of Marlyland* (dalam Indrajit, 2006:37) yang saling berhubungan.

1) *Support*

Dukungan internal organisasi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap pengembangan *e-government* cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari inisiatif pegawai perpustakaan yang memiliki inisiatif untuk dapat menyediakan informasi secara luas kepada masyarakat, sehingga dibuatlah *website* profil Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Lalu selanjutnya yaitu Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki perencanaan bahwa perpustakaan tidak hanya soal buku, perlu adanya fasilitas lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak-anak sehingga dibuatlah RBM (Ruang Belajar Modern). Seiring berjalannya waktu, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan fasilitas *e-government* yang dapat memudahkan masyarakat dalam hal kegiatan perpustakaan seperti aplikasi perpustakaan digital yaitu *iJateng*, dan mempermudah

pencarian buku dalam katalog online lokal yaitu OPAC (*Online Public Access Catalog*) serta fasilitas lainnya seperti RFID semua berdasarkan keinginan yang kuat dari Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan yang baik dan optimal.

2) *Value*

a. Manfaat Untuk Organisasi

Manfaat *e-government* untuk organisasi dinilai sudah dapat dirasakan dengan baik. Hal ini dapat dinilai dari efektivitas dan efisiensi yang dirasakan pegawai Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam bekerja. Peralihan dari manual menuju digital memberikan kemudahan dalam *input* data, ataupun melayani masyarakat sehari-hari.

b. Manfaat Untuk Masyarakat

Manfaat *e-government* untuk masyarakat sudah dapat dirasakan dengan baik. Hal ini dapat dinilai akses untuk masyarakat yang mudah, sederhana, hemat serta cepat berkat adanya program berbasis *e-government*.

3) *Cappacity*

a. Sumber Daya Manusia

Kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam bidang *e-government* sangat kurang. Pegawai otomasi yang mengelola sarana *e-government* hanya terdapat 2 orang dan 1 tenaga *outsourcing*. Padahal, banyak sarana *e-government* di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang harus dikelola dengan baik. Kurangnya Sumber Daya Manusia ini disebabkan oleh sulitnya sistem permintaan pegawai *outsourcing* dan usia pegawai perpustakaan yang sudah tidak lagi muda. Sehingga membuat para pegawai memiliki keinginan yang kecil untuk mengikuti diklat-diklat untuk mengoperasikan sarana dan prasana *e-government*.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber Daya Finansial atau *budget* yang dimiliki Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dinilai masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari pengadaan-pengadaan fasilitas yang memiliki proses cukup lama. Peralihan perpustakaan

konvensional menjadi perpustakaan digital membutuhkan anggaran yang tinggi. Sehingga Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melakukan secara bertahap dan memaksimalkan anggaran dengan memilih prioritas dimana yang efektif akan dijalankan dan yang tidak belum efektif ditunda terlebih dahulu.

c. Infrastruktur

Infrastruktur yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dinilai masih kurang baik. Perlu adanya peningkatan agar lebih optimal lagi. Contohnya seperti wifi yang masih terkadang *down* atau mengalami penurunan kecepatan akses sehingga menjadi lambat. Lalu untuk RFID masih harus ditambah, seperti *chip* yang ada di buku-buku dan alat yang masih kurang untuk akses masuk/keluar perpustakaan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan konsep *e-government*.

Sistem komunikasi dan pelayanan publik sudah berjalan dengan baik, namun penyediaan akses masih terkendala. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengembangan *E-Government* dalam Penyediaan Akses Informasi Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terjadi sebuah permasalahan pada tahap-tahap pengembangan *e-government* di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sehingga berdampak pada penyediaan akses informasinya. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya: (1) Tahap Persiapan: masih terdapat kendala terkait website yang tidak bisa diakses, masih kurangnya sumber daya manusia yang kurang berkompeten, sarana akses masih terbatas, sistem sosialisasi yang kurang konsisten; (2) Tahap Pematangan: website belum memiliki system interaktif, (3) Tahap Pematangan: Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki situs transaksi pelayanan public, (4) Tahap Pemanfaatan: Tahap Pemanfaatan ini merupakan tahap dimana pengembang e-government sudah dapat dirasakan manfaatnya untuk bekerja sama dengan sektir bisnis, masyarakat, maupun pemerintah lainnya. Adapun factor yang mempengaruhi Pengembangan *e-government* di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Faktor Pendorong

Support: Dukungan internal organisasi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap pengembangan *e-government* cukup baik

Value: Manfaat *e-government* untuk organisasi dinilai sudah dapat dirasakan dengan baik, Manfaat *e-government* untuk masyarakat sudah dapat dirasakan dengan baik

2. Faktor Penghambat

Cappacity

- 1) Sumber Daya Manusia: Kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam bidang *e-government* sangat kurang.
- 2) Sumber Daya Finansial: Sumber Daya Finansial atau *budget* yang dimiliki Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dinilai masih kurang.
- 3) Infrastruktur: Infrastruktur yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dinilai masih kurang baik.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengembangan *E-Government* Dalam Penyediaan Akses Informasi Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, maka

saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya adalah dengan memperhatikan dan memperbaiki hal-hal seperti berikut:

- Menjadikan penambahan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan ahli di bidang IT sebagai suatu prioritas. Mewajibkan para pegawai untuk mengikuti diklat sehingga seluruh pegawai memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih mengenai teknologi informasi
- Infrastruktur *e-government* yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebaiknya selalu diperbaharui dan dilakukan pemeliharaan rutin untuk memaksimalkan pelayanan perpustakaan
- Mengajukan anggaran yang lebih sehingga *budget* yang dimiliki Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk memperbaharui dan memperbaiki sarana prasana yang rusak menjadi lebih mudah

F. REFERENSI

Jurnal & Artikel:

Novita, Dien. 2014. *Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan*. Eksplora Informatika Vol. 4, No. 1, Hal.43-52.

Sasmita, Angga M. 2016. *Analisis Dan Pengembangan E-Government*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Yogyakarta, 18-19 Maret 2016.

Widodo, Nurjati. 2016. *Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang)*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 2, No. 4, hal: 227-235.

Ikeanyibe, Okey M., Ori, Ogonnaya E., Okoye, Arinze E. 2017. *Politics & International Relations, Review Article : Governance paradigm in public administration and dilemma of national question in Nigeria*. Cogent Social Science

Nugraha, Joko Tri. 2018. *E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)*. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media Volume 2, Nomor 1, Hal: 32-42.

Novita, Dien. 2014. *Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan*. EKSPLOA INFORMATIKA Vol. 4, No. 1, Hal: 43-52.

Saingura, Hayati. 2018. *Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta*.

Malang: Program Sekolah Demokrasi.

Sangkala. 2012. *Dimensi-dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Buku:

Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) PERBANAS

Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Lee, N.G. 2009. *Penerapan e-government*, Seri Modul 3. *Asian and Pacific Training Centre For Information and Communication Technology For Development*.

Richardus Eko, Indrajit. 2016. *Konsep dan Strategi Electronic Government*.

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2018. *"Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2018"*. Semarang: Jaya Luhur Makmur Abadi.

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Website:

Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.

www.e-gov.waseda.ac.jp. Diakses pada 28 September 2017
<http://perpus.jatengprov.go.id/>. Diakses pada 18 November 2017

Rohman, Ahmad Ainur. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*.

<https://inlislite.perpusnas.go.id/> Diakses pada 20 Januari 2018